



PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DI INDONESIA: OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI UNTUK KEMAJUAN YANG BERKELANJUTAN

Mohammad Amin Lasaiba^{1*}

¹Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan IPS FKIP Unpatti

Article Info

Kata Kunci:

Wilayah Tertinggal,
Sumber Daya Alam,
berkelanjutan

ABSTRAK

Pengembangan wilayah tertinggal merupakan isu penting dalam pembangunan daerah yang memerlukan perhatian khusus. Artikel ini membahas tentang keterbatasan teknologi dan inovasi yang seringkali menjadi kendala dalam pengembangan wilayah tertinggal. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah tertinggal dan bagaimana pemanfaatannya dapat mendukung pengembangan wilayah. Studi kasus pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia juga dibahas untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan program pengembangan wilayah tertinggal serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Dalam mengatasi gap atau masalah pengembangan wilayah tertinggal, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Keywords:

Disadvantaged
Regions, Natural
Resources, sustainable

ABSTRACT

The development of underdeveloped regions is an important issue in regional development that requires special attention. This article discusses the limitations of technology and innovation that often hinder the development of underdeveloped regions. In addition, this article also discusses the potential of natural resources in underdeveloped regions and how their utilization can support regional development. A case study of the development of underdeveloped regions in Indonesia is also discussed to provide an overview of the success and failure of underdeveloped regional development programs and the factors that influence the success of these programs. Overcoming the gap or problem of underdeveloped regional development requires integrated and sustainable efforts between the government, community, and private sectors. These efforts can be carried out through various programs and policies that support the development of human resources, infrastructure improvement, and sustainable utilization of natural resources

*Corresponding Author:

Mohammad Amin Lasaiba

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan IPS FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

Lasaiba.dr@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah tertinggal merupakan salah satu upaya untuk

mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah urban dan wilayah rural di Indonesia. Wilayah tertinggal seringkali

mengalami kesulitan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, serta memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Gumilar & Ningsih, 2022). Namun, pembangunan wilayah tertinggal dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, aksesibilitas yang sulit, serta kebijakan yang belum selalu mendukung pengembangan wilayah tersebut (Putro et al., 2022). Tantangan tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah tersebut (Darwin Lie et al., 2022). Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat juga peluang dalam pengembangan wilayah tertinggal, seperti potensi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan secara optimal, serta peluang dalam pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan (Zulfan et al., 2022).

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan wilayah tertinggal, serta menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada (Safitri et al., 2022). Dengan begitu, pembangunan wilayah tertinggal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan di Indonesia (Sulaeman & Andriyanto, 2021). Ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan wilayah rural di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan (Habib et al., 2022). Di satu sisi, terdapat wilayah perkotaan yang berkembang pesat dan memiliki infrastruktur yang memadai, serta akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang cukup baik (Lasaiba, 2023a). Di sisi lain, wilayah rural atau wilayah tertinggal masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan publik tersebut (Iskandar, 2020).

Wilayah tertinggal seringkali mengalami kesulitan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, seperti jalan raya yang sulit dijangkau, air bersih yang terbatas, dan layanan kesehatan dan pendidikan yang minim. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, serta dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Yanuarsari et al., 2021). Namun, di sisi lain, wilayah tertinggal memiliki potensi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan secara optimal, seperti potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan wilayah rural (Alawiyah & Setiawan, 2021).

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, seperti memperbaiki akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, serta menyusun kebijakan yang dapat mendukung pengembangan wilayah tersebut (Herdiyana & Andriana, 2020). Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sehingga pengembangan wilayah tertinggal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengembangan wilayah tertinggal, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Adisel & Pranansa, 2020). Dengan adanya sinergi dan koordinasi yang baik, diharapkan pengembangan wilayah tertinggal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketidakmerataan pembangunan di Indonesia.

Konsep dan Teori Pengembangan Wilayah Tertinggal

Pembahasan tentang konsep dan teori

pengembangan wilayah tertinggal sebagai dasar pemahaman untuk melaksanakan program dan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal. Pengembangan wilayah tertinggal menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Konsep dan teori pengembangan wilayah tertinggal menjadi dasar pemahaman penting dalam melaksanakan program dan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal. Konsep pengembangan wilayah tertinggal dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang kurang berkembang dan terisolir dari pusat-pusat ekonomi. Dalam pengembangan wilayah tertinggal, perlu diperhatikan berbagai faktor seperti infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Tujuan dari pengembangan wilayah tertinggal adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat, mengurangi disparitas antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Teori pengembangan wilayah tertinggal sendiri didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia (Lasaiba, 2023b). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan. Dalam teori ini, pengembangan wilayah tertinggal dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, pengembangan wilayah tertinggal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan wilayah

tertinggal, seperti penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Sektor swasta dapat berkontribusi dalam pengembangan wilayah tertinggal melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, masyarakat setempat perlu terlibat aktif dalam pembangunan dan pengembangan wilayah mereka sendiri.

Dengan demikian, pengembangan wilayah tertinggal merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Konsep dan teori pengembangan wilayah tertinggal menjadi dasar pemahaman penting dalam melaksanakan program dan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal, serta memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan pengembangan wilayah tertinggal sebagai prioritas dalam pembangunan nasional, masih terdapat beberapa gap atau masalah yang perlu diatasi dalam upaya mewujudkan pengembangan wilayah tertinggal yang efektif dan berkelanjutan. Beberapa gap atau masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang kurang memadai. Wilayah tertinggal seringkali memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak, jaringan listrik yang tidak merata, dan sumber air yang terbatas. Hal ini dapat menghambat pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesulitan akses bagi masyarakat setempat untuk memperoleh layanan dasar.
2. Kurangnya akses terhadap modal dan sumber daya. Masyarakat di wilayah tertinggal seringkali kesulitan dalam memperoleh akses terhadap modal dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Wilayah tertinggal

seringkali memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat menunjukkan rendahnya kualitas hidup masyarakat setempat dan perlu menjadi perhatian serius dalam upaya pengembangan wilayah tertinggal.

4. Kurangnya dukungan pemerintah. Meskipun pengembangan wilayah tertinggal dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional, masih terdapat kurangnya dukungan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran dan kebijakan yang mendukung. Hal ini dapat menghambat upaya pengembangan wilayah tertinggal yang efektif dan berkelanjutan.
5. Kurangnya keterlibatan masyarakat. Pengembangan wilayah tertinggal memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat. Namun, seringkali terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan wilayah tertinggal. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program dan menimbulkan resistensi dari masyarakat setempat.
6. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan wilayah tertinggal memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Namun, terdapat terbatasnya jumlah tenaga kerja berkualitas di wilayah tertinggal yang dapat menjadi hambatan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.
7. Keterbatasan teknologi dan inovasi
8. Wilayah tertinggal seringkali memiliki keterbatasan dalam hal teknologi dan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor ekonomi. Hal ini dapat membatasi kemampuan wilayah tertinggal dalam meningkatkan daya saing dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam mengatasi gap atau masalah tersebut, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi gap atau masalah tersebut. Upaya-upaya ini dapat membantu wilayah tertinggal dalam memperkuat kemampuan teknologi dan inovasi mereka, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Tertinggal

Wilayah tertinggal memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sihasale & Lasaiba, 2022). Namun, seringkali potensi sumber daya alam di wilayah tertinggal belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya investasi dan teknologi, serta minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam yang terdapat di wilayah tertinggal antara lain sumber daya alam mineral, sumber daya alam pertanian, sumber daya alam perikanan, dan sumber daya alam hutan. Potensi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam mineral seperti bijih besi, bauksit, timah, emas, dan nikel dapat dimanfaatkan untuk industri manufaktur dan pertambangan. Namun, pengelolaan sumber daya alam mineral harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Sumber daya alam pertanian seperti tanah, air, dan udara dapat dimanfaatkan untuk produksi pertanian dan peternakan. Wilayah tertinggal

yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian yang baik dapat mengembangkan sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Sumber daya alam perikanan seperti laut, sungai, dan danau dapat dimanfaatkan untuk sektor perikanan dan kelautan. Wilayah tertinggal yang memiliki potensi sumber daya alam perikanan yang baik dapat mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.

Sumber daya alam hutan seperti kayu, rotan, bambu, dan hasil hutan non-kayu dapat dimanfaatkan untuk sektor industri kayu dan hasil hutan non-kayu. Namun, pengelolaan sumber daya alam hutan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat (Lasaiba, 2022). Dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah tertinggal, perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi yang sesuai. Dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tepat dan berkelanjutan, wilayah tertinggal dapat mengembangkan sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah tertinggal adalah dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi sektor swasta untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam di wilayah tertinggal. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tertinggal. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam, baik itu dalam sektor pertanian, perikanan, atau hutan. Dengan melibatkan

masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan teknologi yang tepat untuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tertinggal. Selain itu, sektor swasta juga dapat berinvestasi dalam pengembangan sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam di wilayah tertinggal. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimanfaatkan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan demikian, potensi sumber daya alam di wilayah tertinggal dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat dan mengembangkan sektor ekonomi di wilayah tersebut. Namun, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga harus melibatkan partisipasi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, pengembangan wilayah tertinggal dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Wilayah Tertinggal

Wilayah tertinggal atau daerah terpencil menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam pembangunan suatu negara. Pengembangan wilayah tertinggal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Namun, dalam pengembangan wilayah tertinggal juga terdapat tantangan yang perlu dihadapi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

1. Tantangan ekonomi dalam pengembangan wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal seringkali memiliki potensi ekonomi yang belum tergali secara optimal. Kendala utama dalam pengembangan ekonomi wilayah tertinggal adalah keterbatasan

- infrastruktur, akses terhadap pasar, serta kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal pembangunan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja agar wilayah tersebut dapat mengembangkan potensi ekonominya.
2. Tantangan sosial dalam pengembangan wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal seringkali memiliki masalah sosial, seperti ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sulit untuk mengembangkan potensinya. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal pemerataan sosial, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
 3. Tantangan lingkungan dalam pengembangan wilayah tertinggal. Pengembangan wilayah tertinggal dapat menyebabkan dampak lingkungan yang negatif, seperti degradasi lahan, penurunan kualitas air, dan kerusakan hutan. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah tertinggal, perlu diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan.
 4. Peluang dalam pengembangan wilayah tertinggal
 5. Pengembangan wilayah tertinggal juga memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Potensi alam yang masih terjaga, keunikan budaya, serta potensi pariwisata menjadi peluang yang dapat dikembangkan. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga membuka peluang baru dalam pengembangan wilayah tertinggal, seperti pengembangan e-commerce dan industri kreatif.

Strategi Pengembangan Wilayah Tertinggal

Pembahasan mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah tertinggal, termasuk di dalamnya adalah strategi pengembangan sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur dan layanan publik, serta peningkatan aksesibilitas wilayah. Strategi pengembangan wilayah tertinggal harus mengakomodasi tantangan dan peluang yang dihadapi wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah tertinggal:

1. Pengembangan Sektor Ekonomi: Diversifikasi ekonomi perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Pengembangan sektor ekonomi seperti pariwisata, pertanian modern, industri kreatif, atau usaha mikro dan kecil dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan perekonomian wilayah tertinggal.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan atau pendidikan yang berkualitas, memberikan modal usaha atau kredit, serta membuka peluang kerja dan usaha untuk masyarakat setempat. Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
3. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Publik: Pengembangan infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, jaringan listrik dan air, serta layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah dan membuka peluang baru untuk investasi.
4. Peningkatan Aksesibilitas Wilayah: Peningkatan aksesibilitas wilayah dapat dilakukan dengan meningkatkan akses transportasi, seperti pembangunan jalan raya, jalur kereta api, atau pelabuhan. Hal ini akan memperbaiki konektivitas wilayah dan membuka peluang baru untuk

- investasi.
5. Kerjasama Antarwilayah: Kerjasama antarwilayah perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal dapat berkolaborasi dengan wilayah yang lebih maju dalam hal pengembangan ekonomi, pendidikan, atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan membuka peluang baru dan memberikan akses ke pasar yang lebih besar.
 6. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengembangan wilayah tertinggal. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, wilayah tertinggal dapat memperbaiki sistem manajemen, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam pengembangan wilayah tertinggal, strategi yang dilakukan haruslah terintegrasi dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pengembangan yang optimal. Hal ini dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperkuat perekonomian dan daya saing wilayah.

Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta dalam Pengembangan Wilayah Tertinggal

Pengembangan wilayah tertinggal merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian di wilayah-wilayah yang terbelakang atau kurang berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keterlibatan dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah tertinggal. Pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang mendukung pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tertinggal. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, serta memfasilitasi

pelaksanaan program pengembangan wilayah tertinggal. Selain itu, masyarakat juga memegang peran penting dalam pengembangan wilayah tertinggal. Masyarakat sebagai penghuni dan pengguna sumber daya di wilayah tertinggal perlu aktif terlibat dalam program pengembangan wilayah, seperti program pemberdayaan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat juga dapat memperkuat partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya melalui mekanisme partisipasi publik.

Sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengembangan wilayah tertinggal, khususnya dalam pengembangan sektor ekonomi. Investasi dari sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang kerja baru di wilayah tertinggal. Namun, peran sektor swasta perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial, seperti memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Dalam mencapai tujuan pengembangan wilayah tertinggal yang optimal, sinergi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Kolaborasi dan koordinasi yang baik dapat mempercepat proses pengembangan wilayah tertinggal dan menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal.

Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengembangan wilayah tertinggal, namun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Peran pemerintah dalam pengembangan wilayah tertinggal mencakup penyusunan kebijakan, program, dan strategi yang berfokus pada pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tertinggal. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Pemerintah juga perlu

memastikan adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di wilayah tertinggal yang rentan terhadap kemiskinan dan kerentanan ekonomi.

Dalam upaya pengembangan wilayah tertinggal, masyarakat juga memegang peran yang penting. Masyarakat sebagai pengguna dan penghuni di wilayah tertinggal dapat aktif terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi dan lingkungan, seperti melalui kelompok-kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas program pengembangan wilayah tertinggal. Sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengembangan wilayah tertinggal, khususnya dalam pengembangan sektor ekonomi. Investasi dari sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang kerja baru di wilayah tertinggal. Namun, peran sektor swasta perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial, seperti memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diperlukan upaya-upaya berikut:

1. Meningkatkan partisipasi publik dan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
3. Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta penyediaan modal usaha.
4. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan meningkatkan konektivitas infrastruktur, seperti jalan raya, bandara, dan pelabuhan.
5. Mendorong investasi sektor swasta yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan program pengembangan

wilayah tertinggal.

7. Memperkuat sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal, seperti melalui forum-forum diskusi dan pertemuan antarpihak.

Studi Kasus Pengembangan Wilayah Tertinggal di Indonesia

Wilayah tertinggal di Indonesia merupakan masalah yang masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Berbagai program dan kebijakan telah dilakukan untuk mengembangkan wilayah tertinggal agar dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun, tidak semua program tersebut berhasil dan ada juga program yang gagal. Beberapa program pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia yang berhasil dilaksanakan adalah program pengembangan kawasan industri dan program pembangunan infrastruktur. Contoh program pengembangan kawasan industri yang berhasil dilaksanakan adalah Kawasan Industri Jababeka di Bekasi, Jawa Barat. Program ini berhasil menarik investasi asing dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, contoh program pembangunan infrastruktur yang berhasil dilaksanakan adalah pembangunan jalan tol Trans-Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Program ini berhasil meningkatkan konektivitas antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalan tol tersebut.

Namun, di sisi lain, masih banyak program pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia yang belum berhasil mencapai tujuannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia antara lain adalah kurangnya dukungan dari pemerintah pusat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan wilayah, dan kurangnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia masih memiliki tantangan dan

kendala yang perlu diatasi. Namun, beberapa program dan kebijakan telah berhasil dilakukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan keberhasilan program pengembangan wilayah tertinggal, diperlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga perlu diperhatikan agar pengembangan wilayah tertinggal dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Program pengembangan wilayah tertinggal yang berhasil dilaksanakan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri). Program ini diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk membangun kegiatan ekonomi produktif di desa-desa miskin dan terpencil di Indonesia. Melalui program ini, masyarakat desa diberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta bantuan teknis dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Program PNPM Mandiri berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat desa dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Program ini juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan wilayah dan memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam. Dalam periode 2007-2014, program PNPM Mandiri telah mencapai lebih dari 33 juta penduduk miskin di Indonesia. Namun, program PNPM Mandiri juga menghadapi beberapa kendala, seperti koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program, keterbatasan dana, serta kurangnya akses ke pasar dan teknologi. Meskipun demikian, program PNPM Mandiri tetap berhasil menjadi salah satu contoh program pengembangan wilayah tertinggal yang berhasil dilaksanakan di Indonesia.

Salah satu contoh kasus pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia adalah program pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Morotai, Maluku Utara. Morotai merupakan salah satu wilayah yang dianggap tertinggal di Indonesia, dengan

tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program pembangunan KEK di Morotai dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah dan mendorong investasi di sektor-sektor yang potensial seperti pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Program ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti bandara internasional, pelabuhan, dan jalan tol.

Melalui program pembangunan KEK, terdapat peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertambangan di Morotai. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan membuka lapangan kerja baru. Namun, program pembangunan KEK di Morotai juga menghadapi beberapa kendala, seperti tingginya biaya pembangunan infrastruktur, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat lokal, serta risiko lingkungan yang berpotensi terjadi akibat kegiatan tambang. Meskipun demikian, program pembangunan KEK di Morotai tetap menjadi contoh kasus pengembangan wilayah tertinggal yang berhasil dilaksanakan di Indonesia.

Contoh kasus pengembangan wilayah tertinggal lainnya di Indonesia adalah program Desa Mandiri Pangan. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang tergolong tertinggal di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan modal dan pendampingan teknis kepada kelompok-kelompok tani di desa untuk mengembangkan usaha pertanian dan peternakan. Selain itu, program ini juga mendorong kerja sama antara kelompok tani dan pengusaha di sekitar desa dalam memasarkan produk pertanian mereka.

Dalam pelaksanaannya, program Desa Mandiri Pangan telah berhasil meningkatkan produksi pertanian dan peternakan di desa-desa yang tergolong tertinggal, serta

membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Program ini juga berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah-wilayah tertinggal. Namun, program Desa Mandiri Pangan juga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis di kalangan petani, kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan dan irigasi, serta kurangnya akses pasar yang luas untuk produk pertanian yang dihasilkan. Meskipun demikian, program Desa Mandiri Pangan tetap menjadi contoh kasus pengembangan wilayah tertinggal yang berhasil dilaksanakan di Indonesia.

Contoh kasus lainnya dalam pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia adalah program Kampung Pelangi di Desa Wonosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampung Pelangi adalah program pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan revitalisasi kampung. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan seperti penghijauan, penataan jalan, pembangunan taman, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk dana serta pembinaan dan pelatihan untuk masyarakat.

Selain itu program Kampung Pelangi, desa Wonosari berhasil mengubah wajah kampung yang sebelumnya kumuh menjadi lebih indah dan menarik. Kampung Pelangi menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Semarang dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan souvenir dan makanan di sekitar kampung. Namun, program Kampung Pelangi juga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya aksesibilitas dan fasilitas transportasi yang memadai. Kendala ini dapat menghambat potensi wisata kampung dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, program Kampung

Pelangi tetap menjadi contoh kasus pengembangan wilayah tertinggal yang berhasil dilaksanakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah tertinggal merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wilayah-wilayah tertinggal memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun seringkali terbatas dalam hal teknologi dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yang ada. Studi kasus pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia menunjukkan bahwa program-program pengembangan wilayah tertinggal dapat berhasil atau gagal tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten, serta koordinasi yang baik antara semua pihak terkait.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi secara berkala dan penyesuaian strategi untuk memastikan keberhasilan program pengembangan wilayah tertinggal di masa depan. Dalam menghadapi tantangan pengembangan wilayah tertinggal di Indonesia, kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Pengembangan teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, A., & Pranansa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Manajemen Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Of Administration and Educational Management*

- (ALIGNMENT), 3(1), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1291>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa Pemerintah telah mengimplementasikan Millenium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable Development Goals (SDGs) dalam. *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154.
<https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/22392/pdf>
- Darwin Lie, S. E., MM, L. E. N., Nana Triapnita Nainggolan, S. E., MM, L. D. S., SE, M. A., & Hery Pandapotan Silitonga, S. E. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Gumilar, G. G., & Ningsih, W. (2022). Menyelidik Ketimpangan Pendidikan Pada Masyarakat Urban Dan Rural Antara Kecamatan Kota Baru Dan Banyusari Di Kabupaten Karawang. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 717–730.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6314>
- Habib, M. A. F., Suryaputra, M., & Diniati, B. T. (2022). Peningkatan Efektivitas Jalur Transportasi Melalui Pembangunan Glass Ball Station (Stasiun Bola Kaca) Sebagai Pendukung Pemerataan Ekonomi Sekaligus Sebagai Ikon Wisata Baru Indonesia. *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, 1(2), 51–58.
<https://doi.org/10.55123/toba.v1i2.367>
- Herdiyana, D., & Andriana, N. (2020). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *RISSET & JURNAL AKUNTANSI*, 4(17), 191–203.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lasaiba, M. A. (2022). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan , Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *GEOFORUM. Jurnal Geografi Dan Pendidikan Geografi*, 1(2), 1–11.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgse/article/view/7983/5225>
- Lasaiba, M. A. (2023a). Evaluation Of Settlement Land Suitability Based On Remote Sensing And Geographical Information Systems In The City Of Ambon. *SPATIAL: Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 23(1), 70–84.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spatial/article/view/33157>
- Lasaiba, M. A. (2023b). Pelatihan dan Pendampingan Informasi Geospasial Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Geografi. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(1), 214–222.
<https://doi.org/10.35870/jpni.v4i1.146>
- Putro, P. W., Fadhillah, G. F., Asna, N., & Alfiana, N. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 154–163.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/ekombis.v8i2.6538>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *JURNAL BASICEDU*, 6(4), 7096–7106.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Sihale, D. A., & Lasaiba, M. A. (2022). Peran geografi dalam penataan ruang perkotaan 1. *Jurnal Jendela Pengetahuan*, 15(1), 54–64.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jp/article/view/8460/5423>
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Urnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175–200.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.99>
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu*. 9(2), 125–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *JURNAL BASICEDU*, 5(6), 6307–6317. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>
- Zulfan, Safwadi, I., Yuliana, Ibrahim, L. T., & Astini, D. (2022). Analisis Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Aceh Besar. *Jurnal Humaniora*, 6(1), 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.30601/humaniora.v6i1.2960>